

Evaluasi Manajemen Krisis dalam Penanganan Semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo

Revie Sheehan Bary Alfath ^{*1}
Bryan Odwin Amal Biqalbi ²
Ahmad Fadhil Anas ³
Muhammad Putra Pamungkas ⁴
Meirinawati ⁵
Trenda Aktiva Oktariyanda ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: 25040674276@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674270@mhs.unesa.ac.id²,
25040674282@mhs.unesa.ac.id³, 25040674307@mhs.unesa.ac.id⁴, meirinawati@unesa.ac.id⁵,
trendaoktariyanda@unesa.ac.id⁶

Abstrak

Peristiwa semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang memiliki dampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan krisis dalam penanganan bencana tersebut menggunakan pendekatan fungsi manajemen POSC (Planning, Organizing, Staffing, dan Controlling). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen pemerintah, dan media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan krisis belum berjalan secara optimal, ditandai dengan perencanaan yang masih bersifat reaktif, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui perencanaan berbasis mitigasi, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang lebih transparan dan berkelanjutan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: Manajemen krisis, Semburan Lumpur Lapindo, Bencana lingkungan, Evaluasi kebijakan, Manajemen publik, Penanganan bencana

Abstract

The Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo is one of the largest environmental disasters in Indonesia, significantly impacting social, economic, and environmental aspects of the affected communities. This study aims to analyze crisis management in handling the disaster using the POSC management function approach (Planning, Organizing, Staffing, and Controlling). The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach, utilizing sources such as academic journals, reference books, government documents, and mass media. The findings indicate that crisis management has not been optimal, as reflected in reactive planning, ineffective inter-agency coordination, limited human resources, and inconsistent monitoring and evaluation systems. Therefore, improvements are needed through mitigation-based planning, strengthened cross-sector coordination, enhanced human resource capacity, and more transparent and sustainable supervision systems to ensure more effective disaster management.

Keywords: Crisis management, Lapindo mudflow, Environmental disasters, Policy evaluation, Public management, Disaster management

PENDAHULUAN

Peristiwa semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia dengan dampak yang kompleks. Sejak pertama kali terjadi pada tahun 2006, bencana ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta menghadapi ketidakpastian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Kompas (2020), bencana ini telah menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa warga mengungsi dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi

tersebut menjadikan penanganan kasus ini sebagai tantangan besar bagi pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Untuk menghadapi situasi tersebut, diperlukan sistem pengelolaan yang terstruktur dan responsif, yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penanganan bencana karena mencakup fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Penerapan manajemen krisis yang efektif diharapkan dapat meminimalkan dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sumartono (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan krisis sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, koordinasi lintas sektor, serta kapasitas adaptif dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, Carlo & Rita (2025) menegaskan bahwa pendekatan manajemen krisis yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas respons pemerintah dalam menghadapi bencana lingkungan yang kompleks.

Faktanya dilapangan menunjukkan penanganan semburan lumpur Lapindo masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain perencanaan yang cenderung reaktif, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara konsisten, sehingga pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Menurut BBC Indonesia (2018), proses pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak sempat mengalami keterlambatan dan menimbulkan berbagai keluhan. Di samping itu, proses pengambilan keputusan yang relatif lambat serta kurangnya transparansi dalam beberapa kebijakan juga menjadi perhatian. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Fahmi (2025) menyatakan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dan kurangnya sistem evaluasi yang berkelanjutan menjadi hambatan utama dalam pengelolaan krisis di sektor publik. Bahkan, penelitian Husaini (2024) menunjukkan bahwa transparansi kebijakan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam situasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan krisis dalam kasus ini masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami memilih topik mengenai evaluasi manajemen krisis dalam penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo karena kasus ini merupakan contoh nyata bencana lingkungan dengan dampak luas dan berkepanjangan. Selain itu, kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik menjadikan kasus ini penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas pengelolaan krisis yang telah dilakukan serta menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas penanganan bencana di masa mendatang.

METODE

Penelitian mengunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menjelaskan secara mendalam terkait pengelolaan krisis dalam penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo tanpa adanya manipulasi variabel. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah dan menekankan pada pemahaman makna dari suatu fenomena. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti dapat menganalisis fenomena secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen resmi pemerintah, serta pemberitaan media massa. Sumber yang digunakan di antaranya berasal dari Kompas (2020) dan BBC Indonesia (2018) yang membahas dampak serta penanganan kasus lumpur Lapindo.

Penelitian ini juga mengacu pada berbagai kajian ilmiah yang relevan dengan manajemen krisis dan kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan agar sesuai dengan fokus penelitian. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami, dan diakhiri

dengan penarikan kesimpulan. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi manajemen berdasarkan teori POSC (*Planning, Organizing, Staffing, dan Controlling*) sebagai kerangka untuk mengevaluasi pengelolaan krisis. Setiap aspek digunakan untuk menilai perencanaan, koordinasi, sumber daya manusia, serta pengawasan dalam penanganan bencana, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas manajemen krisis yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai sumber literatur, pengelolaan krisis dalam penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo dapat dikaji menggunakan pendekatan fungsi manajemen POSC yang meliputi *planning, organizing, staffing, dan controlling*. Keempat aspek ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana efektivitas manajemen krisis yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani bencana yang bersifat kompleks dan berkepanjangan.

Planning (Perencanaan)

Penanganan semburan lumpur Lapindo menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah pada tahap awal cenderung bersifat reaktif. Hal ini terlihat dari kebijakan yang lebih fokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, seperti pembangunan tanggul untuk menahan aliran lumpur. Menurut Kompas (2020), pembangunan tanggul dilakukan sebagai langkah darurat, namun belum didukung perencanaan jangka panjang yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan belum berjalan optimal, terutama dalam aspek mitigasi dan kesiapsiagaan. Sejalan dengan Sholih & Nugroho (2021), lemahnya perencanaan berbasis risiko menjadi salah satu kendala dalam penanganan bencana di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep manajemen risiko ke dalam kebijakan penanganan bencana. Perencanaan seharusnya tidak hanya berfokus pada respons darurat, melainkan mencakup langkah preventif serta strategi pemulihan jangka panjang. Dengan adanya perencanaan yang komprehensif sejak awal, dampak bencana yang ditimbulkan dapat diminimalkan secara lebih efektif.

Organizing (Pengorganisasian)

Dalam aspek pengorganisasian, penanganan semburan lumpur Lapindo melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPLS sebagai lembaga khusus. Pembentukan BPLS menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan struktur organisasi yang fokus dalam menangani krisis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti lemahnya koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan ketidaksesuaian kebijakan di lapangan. Perubahan struktur melalui pembubaran BPLS dan pengalihan ke PPLS juga menunjukkan adanya ketidakefektifan sistem sebelumnya. Hal ini sejalan dengan Suwandi (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga sering menjadi masalah dalam manajemen krisis. Permasalahan ini terjadi karena belum adanya sistem koordinasi yang benar-benar terintegrasi antar lembaga. Setiap instansi cenderung bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa adanya sinkronisasi yang kuat. Dalam situasi krisis, diperlukan satu komando yang jelas agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Staffing (Sumber Daya Manusia)

Dalam aspek sumber daya manusia, penanganan kasus lumpur Lapindo masih menghadapi keterbatasan baik dari segi jumlah maupun kualitas tenaga kerja. Kurangnya tenaga ahli dan kesiapan dalam menghadapi bencana skala besar menyebabkan proses penanganan kurang optimal. Selain itu, kemampuan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi staffing belum berjalan maksimal.

Penelitian Afrianti (2025) juga menyebutkan bahwa kapasitas SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan krisis. Masalah ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM dalam sektor kebencanaan belum menjadi prioritas utama. SDM merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Tanpa SDM yang kompeten dan siap, kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak akan berjalan secara efektif.

Controlling (Pengawasan)

Dalam aspek pengawasan, sistem monitoring dan evaluasi dalam penanganan lumpur Lapindo belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal. Menurut BBC Indonesia (2018), proses pemberian kompensasi mengalami keterlambatan dan menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam kebijakan turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Temuan ini sejalan dengan Fahmi (2025) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu hambatan dalam efektivitas kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi yang diterapkan masih belum berorientasi pada hasil di lapangan. Evaluasi cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih transparan, terintegrasi, dan dilakukan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan pendekatan fungsi manajemen POSC (Planning, Organizing, Staffing, dan Controlling), dapat disimpulkan bahwa pengelolaan krisis dalam penanganan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari perencanaan yang masih bersifat reaktif, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang belum konsisten. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antar fungsi manajemen belum berjalan dengan baik dalam mendukung penanganan krisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui perencanaan yang lebih strategis dan berbasis mitigasi, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih transparan dan berkelanjutan agar penanganan bencana di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianti, S. Y. (2025). Kesiapan Sdm Dalam Upaya Tanggap Darurat Saat Terjadi Krisis Kesehatan Di Upt Rsud Lanto Dg Pasewang Jeneponto. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kesehatan*, 2(2), 37-45.
- BBC Indonesia. (2018). Artikel BBC Indonesia tentang penanganan dan kompensasi korban lumpur Lapindo.
- Carlo, N., & Rita, E. (2025). *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Deepublish.
- Fahmi, M. (2025). Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 1-7.
- Husaini, H. (2024). Peran humas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 112-121.
- Kompas. (2024, 28 Mei). Merekam Peristiwa Bencana Lumpur Lapindo. Kompas.id. Artikel Kompas tentang Lapindo
- Shalih, O., & Nugroho, R. (2021). Reformulasi kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(2), 2021.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumartono, S. (2025). *Manajemen Komunikasi Krisis*. Alinea Indonesia.

Suwandi, S. (2023). Manajemen Krisis Terkini: Strategi Adaptif Dalam Menghadapi Bencana Dan Tantangan Mendadak. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 473-482.